

**KEWENANGAN HAKIM DALAM PERKARA
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jawa Timur

SKRIPSI



Disusun Oleh :

KASIHARDO HERLAMBAANG

0771010027

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN
PERUMAHAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2011**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul: KEWENANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN.

Penyusunan Skripsi untuk memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Disamping itu dapat memberikan hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang penulis dapat selama perkuliahan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan bimbingan serta saran yang sangat berharga kepada :

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
2. Bapak Sutrisno, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs. E.C. Gendut Sukarno,MS.,selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Subani, SH., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam

penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.

5. Ibu Wiwin Yulianingsih, SH., MKn, Selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Kedua orang tua kami tercinta, serta seluruh keluarga besarku yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doanya selama ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan karena kurangnya pengalaman dan terbatasnya pengetahuan yang penulis miliki.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan tersebut dengan kebaikan pula. Harapan penulis semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, November 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN REVISI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAKSI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Kajian Pustaka	5
1.5.1 Hakim	5
1.5.2 Tanggung Jawab Hukum Hakim	8
1.5.3 Kemandirian Hakim	9
1.5.4 Kewajiban dan Larangan Hakim	9
1.5.5 Kedudukan Hakim	10
1.5.6 Upaya Hukum menurut Hukum Perdata	11
1.5.7 Alat Bukti menurut Hukum Perdata	14

1.5.8 Putusan Hakim yang Cacat Hukum	15
1.5.9 Kode Etik dan Kode Kehormatan Hakim.....	17
1.5.10 Azas-azas dalam Peradilan	21
1.5.11 Proses Persidangan yang cepat dan murah.....	22
1.5.12 Wewenang Hakim.....	22
1.5.13 Penggugat	23
1.5.14 Tergugat.....	24
1.5.15 Mediasi	24
1.5.16 Pengertian Putusan.....	26
1.6 Metode Penelitian	27
1.6.1 Sumber Data	28
1.6.2 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	30
1.6.3 Metode Analisis Data.....	30
1.6.4 Lokasi Penelitian.....	30
1.7 Sistematika Penulisan	31
BAB II Azas-Azas Peradilan Umum dalam Perkara Perdata	33
2.1 Hakim	36
2.2 Kemandirian Hakim	38
2.3 Azas-azas Hakim dalam Melakukan Persidangan.....	38
2.4 Kewajiban dan Larangan Hakim.....	39
2.5 Azas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.....	40
BAB III Pelaksanaan Putusan Hakim oleh Penggugat maupun Tergugat	
3.1 Pelaksanaan Kode Etik Hakim.....	45

3.2 Putusan Hakim.....	47
3.3 Sistem Pengawasan Hakim.....	51
3.4 Pelaksanaan Putusan	52
BAB IV Penutup	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Kasihardo Herlambang
NPM : 0771010027
Tempat Tanggal Lahir : Denpasar. 02 Mei 1989
Program Studi : Strata1 (S1)
Judul Skripsi :

KEWENANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN NEGERI SURABAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN
KEHAKIMAN

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kinerja hakim dalam memutus suatu perkara perdata di lingkup Pengadilan Negeri Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui wawancara. Sumber data yang diperoleh dari literatur dan perundang-undangan yang berlaku. Analisa data menggunakan analisa kualitatif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan persidangan selama ini di Pengadilan Negeri telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan azas-azas peradilan yang cepat, biaya ringan, dan sederhana.

Sedangkan dalam pelaksanaan putusan Undang-undang telah jelas menyatakan bahwa ada sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan putusan hakim, sanksi-sanksi tersebut berupa upaya paksa yang dilakukan oleh Pihak Pengadilan Negeri, kemudian ada sanksi administratif.

Di dalam peradilan Umum yang diantaranya Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer mempunyai kewenangan untuk melakukan persidangan dan azas peradilan umum yang dipakai yaitu sidang terbuka untuk umum, hakim bersifat pasif, azas sederhana, cepat, biaya ringan dan putusan harus berdasarkan Ketuhanan yang maha esa.

Kata Kunci : Kewenangan Hakim, Azas-azas Umum dalam Peradilan,

Pelaksanaan Putusan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sebagai konsekuensi dari sistem pembagian kekuasaan yang diterapkan di Negara ini, fungsi kekuasaan kehakiman atau yudikatif dipegang oleh lembaga-lembaga yang ditentukan oleh Undang-undang dasar Negara republik Indonesia. Pengadilan, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah suatu unsur penting dalam sebuah Negara yang berdasarkan hukum. Hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri, netral, dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Dalam pelaksanaannya hakim dibatasi oleh segala peraturan yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung selaku pengawas dalam ruang lingkup hakim, dan apabila dalam pelaksanaan proses peradilan terdapat kesalahan ataupun unsur kesengajaan dalam menjatuhkan putusan, maka hakim dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana berdasarkan peraturan yang berlaku, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Kekuasaan Kehakiman

(Selanjutnya disingkat UU Kekuasaan Kehakiman) Pasal 29 ayat (6). Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga Negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Besarnya kewenangan dan tingginya tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang selalu diucapkan ‘ Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa’’. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan pada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa¹

Suatu perkara perdata yang di putus dalam persidangan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Selanjutnya disingkat UU Peradilan Umum) yang dimana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, hal ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, kemudian disesuaikan pula dengan hukum acara perdata

Proses beracara di pengadilan tentunya tidak akan lepas dari peranan dan tugas hakim sebagai pejabat penegak hukum yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu sengketa. Di pengadilan sengketa yang diajukan tersebut akan diproses dan hakim akan menjatuhkan putusannya.

Putusan hakim tersebut akan menimbulkan akibat hukum, yaitu bahwa jika kemudian muncul sengketa tentang hubungan hukum yang

¹ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2005, Hal 33

telah ditetapkan dengan suatu putusan hakim dimana para terikat pada isi putusan tersebut. Kemampuan mengikat para pihak di kemudian hari dari putusan hakim itulah yang disebut kekuasaan putusan hakim.

Hakim memegang peranan penting dari awal sampai akhir pemeriksaan di pengadilan. Berdasarkan Pasal 119 Herzien Indonesich Reglement atau 143 Rechreglement Buitengewesten (Selanjutnya disingkat HIR/Rbg) hakim berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatannya ke pengadilan dengan maksud agar sengketa tersebut menjadi jelas duduk sengketanya dan memudahkan hakim memeriksa sengketa itu. Dalam pemeriksaan sengketa, hakim betul-betul harus bersikap bebas dan tidak memihak siapapun. Di dalam persidangan, hakim juga harus mendengar keterangan kedua belah pihak dengan pembuktian masing-masing sehingga hakim dapat menemukan kebenaran sesungguhnya

Hakim dalam persidangan haruslah bersifat bebas tanpa memihak pihak siapapun yang bersengketa, dikarenakan hakim wajib bersikap profesional dalam mengemban tugasnya. Kewenangan tersebut tidaklah semata-mata disalah gunakan oleh hakim, kewenangan hakim dalam persidangan haruslah sesuai dengan UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang tersebut mengatur segala bentuk kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara.

Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil yang dimaksudkan untuk menegakkan hukum perdata materiil. Hukum acara

perdata ini menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Ketentuan hukum acara perdata dimaksudkan untuk melaksanakan dan mempertahankan kaidah hukum materiil perdata yang ada.²

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diajukan beberapa permasalahan yang dapat menjadi pokok bahasan. Permasalahan-permasalahan tersebut apabila dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah putusan hakim dalam perkara perdata sudah sesuai dengan azas-azas proses persidangan yang cepat dan murah sesuai dengan UU Kekuasaan Kehakiman yang berdasarkan Demi Ketuhanan yang Maha Esa ?
2. Apakah putusan hakim dalam perkara perdata bisa dilaksanakan penggugat maupun tergugat ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tentang kesesuaian putusan hakim dengan UU Kekuasaan Kehakiman.
2. Mengetahui tentang pelaksanaan putusan hakim dalam memutus perkara perdata baik penggugat maupun tergugat.

² Bambang Waluyo, Implementasi Kekuasaan Kehakiman, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hal 19

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terutama bagi pihak-pihak yang sedang bersengketa dan dalam hal ini juga untuk mengetahui praktek dilapangan peradilan tentang kinerja hakim

2. Manfaat Teoritis

Sebagai referensi dan informasi di fakultas hukum dan diharapkan sebagai sumbangan pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, agar ilmu itu tetap hidup dan berkembang khususnya tentang Kehakiman.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Hakim

Sebagai sebuah profesi yang berkaitan dengan proses di pengadilan, definisi hakim menyebutkan hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Serta mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menuntut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya Negara hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam

menjalankan tugasnya. Nilai disini diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertindak laku, baik disadari maupun tidak. Nilai-nilai itu adalah sebagai berikut.³

1. Profesi hakim adalah profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Di sini terkandung nilai kemerdekaan dan keadilan
2. Selanjutnya, nilai keadilan juga tercermin dari kewajiban hakim untuk menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan agar keadilan tersebut dapat dijangkau semua orang. Dalam mengadili, hakim juga tidak boleh membedakan orang dan wajib menghormati asas praduga tak bersalah. Kewajiban menegakkan keadilan ini tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama, tetapi juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Apabila hakim melihat adanya kekosongan hukum karena tidak ada atau kurang jelasnya

³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, Pradnya Pramita, Jakarta: 1996, hal 46-48.

hukum yang mengatur suatu hal, maka ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Nilai ini juga disebut nilai keterbukaan.

4. Hakim menjunjung tinggi kerjasama dan kebiwaan korps. Nilai kerja sama ini tampak dari persidangan yang berbentuk majelis, dengan sekurang-kurangnya dari tiga orang hakim. Sebelum menjatuhkan putusannya, para hakim ini melakukan musyawarah secara tertutup.
5. Hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Secara vertikal berarti ia bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pertanggungjawaban secara horizontal berarti ditujukan kepada manusia, baik kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi maupun kepada masyarakat luas. Berkaitan dengan pertanggungjawaban horizontal. Pasal 25 ayat (1) UU kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa :

 “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”⁴

⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2004 pasal 25 ayat (1).

1.5.2 Tanggung Jawab Hukum Hakim

Beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan hakim dan peradilan mencatumkan dan mengatur pula hal-hal seputar tanggung jawab hukum profesi hakim. UU Kekuasaan Kehakiman mencantumkan beberapa tanggung profesi yang harus ditaati oleh hakim, yaitu :

- a. Pasal 28 ayat (1), menyatakan :

Bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

- b. Pasal 28 ayat (2), menyatakan :

Bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa

- c. Pasal 29 ayat (3), menyatakan :

Bahwa hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua salah seorang hakim anggota, Jaksa, Advokat atau Panitera

Selain peraturan perundang-undangan yang menguraikan tanggung jawab profesi hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman secara umum, terdapat pula ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai

tanggung jawab profesi hakim agung, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

1.5.3 Kemandirian Hakim

Yang dimaksudkan kemandirian hakim adalah mandiri, tidak tergantung kepada apa atau siapapun dan oleh karena itu bebas dari pengaruh apa atau siapapun.

Mencari keadilan harus mandiri , independen dalam arti tidak tergantung atau terikat dari siapapun sehingga tidak harus memihak pada siapapun agar putusannya itu objektif. Kemandirian itu menuntut pula bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus bersifat bebas. Dengan demikian kemandirian hakim tidak dapat dipisahkan dari kebebasan hakim melainkan merupakan suatu kesatuan.

1.5.4 Kewajiban dan Larangan Hakim

Dalam prakteknya hakim mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan diantaranya mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak secara seimbang tanpa memihak siapapun, sopan dalam bertutur kata dan bertindak, memeriksa perkara dengan arif, cermat dan sabar, memutus perkara berdasarkan atas hukum dan rasa keadilan, menjaga martabat dan kehormatan hakim.

Kemudian terdapat larangan-larangan yang harus dihindari oleh hakim antara lain melakukan kolusi dengan pihak yang berkaitan dengan perkara yang akan atau sedang ditangani, menerima atau mendapat janji-janji dari pihak yang berperkara, membicarakan suatu perkara yang

ditanganinya diluar persidangan, mengeluarkan pendapat atas suatu kasus yang ditanganinya baik dalam persidangan maupun diluar persidangan mendahului putusan, melecehkan sesama hakim, jaksa, panitera atau penasehat hukum, para pihak yang berperkara atau pihak lain.

1.5.5 Kedudukan Hakim

Kedudukan Hakim telah diatur dalam Undang-Undang No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 1999, Undang-undang tersebut didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Hakim dibatasi pada badan peradilan dibawah Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) amandemen ke-III Undang-Undang Dasar 1945 eksistensi badan peradilan hukum dibawah Mahkamah Agung yang meliputi empat lingkungan peradilan yaitu, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara yang disebutkan secara eksplisit dalam konstitusi sebagai alat perlengkapan Negara yaitu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sehingga dapat dikelompokkan dalam institusi dasar Negara bersama dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

1.5.6 Upaya-upaya Hukum menurut Hukum Perdata

1.5.6.1 Banding

Dasar hukum : Pasal 188 - 194 Herzien Indonesisch Reglement
(Selanjutnya disingkat HIR)⁵

1. Tenggang waktu mengajukan banding

Tenggang waktu pernyataan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir. Ketentuan ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan jo pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2. Prosedur pengajuan banding

1. Permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan oleh yang bersangkutan maupun kuasanya.
2. Panitera Pengadilan Negeri akan membuat akte banding yang memuat hari dan tanggal diterimanya permohonan banding dan ditanda tangani oleh panitera dan pembanding. Permohonan banding tersebut dicatat dalam register induk perkara perdata dan register banding perkara perdata.

⁵ Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, Hal 94

3. Permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima.
4. Para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari.
5. Pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undang undang sepanjang belum diputuskan oleh pengadilan tinggi , pencabutan permohonan banding masih diperlukan.

1.5.6.2 Kasasi

1. Diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Mahkamah Agung jo Pasal 30 UU Kekuasaan Kehakiman, antara lain :⁶

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
- c. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam

⁶ R. Soeroso,Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara, Proses Persidangan, cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta ,1994, Hal 92

kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

2. Prosedur pengajuan banding

- a. Permohonan kasasi disampaikan oleh pihak yang berhak baik secara tertulis atau lisan kepada panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut dengan melunasi biaya kasasi.
- b. Pengadilan negeri akan mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar dan hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas
- c. Paling lambat 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan panitera Pengadilan Negeri memberitahukan secara tertulis pada pihak lawan.

1.5.6.3 Verzet

Verzet merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan PN yang diputus verstek

Prosedur pengajuan Verzet (Pasal 129 Herzien Indonesisch Reglement /153 Rechreglement Buitengewesten): ⁷

⁷ Supomo , Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnjaparamita, Jakarta, 1967,
Hal 39

- a. Dalam waktu 14 hari setelah putusan verstek itu diberitahukan pada tergugat sendiri
- b. Bila memungkinkan di periksa oleh majelis hakim yang sama
- c. Pembuktian berdasarkan SEMA No 9 Tahun 1964 Tentang Putusan Verstek, walaupun sebagai pelawan bukan sebagai penggugat tapi tetap tertawan sehingga yang membuktikan dulu adalah tertawan/penggugat.

1.5.6.4 Peninjauan Kembali.

Upaya hukum peninjauan kembali merupakan suatu upaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun mahkamah agung yang telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan pelaksanaan putusan (Eksekusi)⁸

1.5.7 Alat Bukti menurut Hukum Perdata

Hukum pembuktian dalam perkara perdata merupakan sebagian dari hukum acara perdata. Hukum pembuktian hanya berlaku dalam perkara yang mengadili suatu sengketa dengan jalan memeriksa para pihak dalam sengketa tersebut.

Dalam pembuktian diperlukan adanya alat alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang untuk membuktikan peristiwa yang dikemukakan dimuka sidang. Alat bukti itu

⁸ R. Soeroso, op.cit.,Hal 93

bermacam-macam dan macam-macam alat bukti dalam hukum perdata berbeda dengan macam-macam alat bukti dalam hukum pidana, walaupun ada alat bukti yang sama. Alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu :

- a. Bukti tertulis/Surat
- b. Bukti dengan saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Dalam prakteknya masih terdapat satu macam alat bukti lagi yang sering digunakan ialah pengetahuan hukum. Yang dimaksud pengetahuan hukum adalah hal atau keadaan yang diketahui sendiri dalam sidang, misalnya hakim melihat sendiri pada waktu melakukan pemeriksaan setempat bahwa benar ada barang penggugat yang dirusak oleh tergugat dan sampai seberapa jauh kerusakannya⁹.

1.5.8 Putusan Hakim yang Cacat Hukum

Di dalam dunia pengadilan, sebenarnya hanya ada satu hal pokok yang dicari para justialance (pencari keadilan) yaitu Putusan Hakim. Setelah putusan tersebut sudah final dan berkekuatan hukum tetap maka akan segera dilaksanakan eksekusi (akibat dari putusan tersebut).

⁹ A.Pitlo, Hukum Pembuktian dan Daluarsa menurut BW Belanda. 1978, Hal 33

Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkara-perkaranya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Tetapi dengan adanya putusan pengadilan bukan berarti sudah menyelesaikan perkara secara tuntas, akan tetapi perkara akan dianggap selesai apabila ada pelaksanaan putusan atau eksekusi. Dengan kata lain pencari keadilan mempunyai tujuan akhir yaitu agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan pengadilan atau hakim. Dan pemulihan tersebut akan tercapai apabila putusan dapat dilaksanakan¹⁰.

Sering kali para pihak yang bersengketa atau pencari keadilan tidak merasa hak-haknya dipenuhi dalam suatu pengadilan, hal ini dikarenakan adanya suatu permainan yang cukup bersih di area wilayah lingkup pengadilan itu sendiri. Hal ini tercermin dari kasus yang ada ditengah-tengah masyarakat, dalam proses persidangan yang berlangsung, salah satu pihak tidak dapat menunjukan suatu alat bukti yang lengkap, tetapi majelis hakim sudah menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam menyikapi masalah seperti ini dapat ditinjau dari segi yuridis bahwa putusan hakim tersebut diduga cacat hukum.

¹⁰ Bambang Waluyo, Implementasi Kekuasaan Kehakiman, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hal 112

1.5.9 Kode Etik Hakim atau Kode Kehormatan Hakim

Untuk jabatan hakim, Kode Etik Hakim disebut juga Kode Kehormatan Hakim, berbeda dengan notaris atau advokat. Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Oleh karena itu Kode Kehormatan Hakim memuat 3 jenis etika, yaitu : ¹¹

1. Etika kedinasan pegawai negeri sipil
2. Etika kedinasan hakim sebagai pejabat fungsional penegak hukum
3. Etika hakim sebagai manusia pribadi manusia dan pribadi anggota masyarakat.

Uraian Kode Etik Hakim berdasarkan KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG DAN KETUA KOMISI YUDISIAL R.I. No : 1. 047/KMA/SK/IV/2009 2. 02./SKB/P.KY/IV/2009 meliputi :

1. Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan suatu pada tempatnya dan memberikan apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hakim, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, Hal 19

mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberikan kesempatan yang sama .

2. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum , norma keagamaan, norma kebiasaan maupun kesusilaan dengan memerhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapa pun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang

teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedapankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6. Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan

dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan.

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma norma atau kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalah gunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan sikap tenggang rasa serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas dalam mengemban tugas.

10. Bersikap Profesional.

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, ketrampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan yang efektif dan efisien.

1.5.10 Azas-azas dalam Peradilan

Setiap Hakim harus mempunyai pegangan atau pedoman dalam melaksanakan Proses Persidangan, yaitu :¹²

- a. Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan, dimana setiap orang berhak mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- b. Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti serta memperoleh informasi tentang proses persidangan.

¹² Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa, FH UII Press, Yogyakarta, 2005

- c. Putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain.
- d. Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis dimana argumentasi tersebut diawasi serta dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin sifat keterbukaan dan kepastian hukum dalam proses peradilan

1.5.11 Proses Persidangan yang Cepat dan Murah

Seperti diketahui, Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, murah dan cepat. Ketentuan ini dimaksudkan agar dapat memuaskan para pencari keadilan, terutama bagi yang awam di bidang hukum dan golongan ekonomi lemah. Asas peradilan yang baik ialah prinsip-prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai dengan aturan dasar berdasarkan ketentuan yang ada.

1.5.12 Wewenang Hakim dalam Memutus Perkara Perdata

Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu dasar yang pokok dan utama. Disamping sebagai pegawai negeri hakim juga berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Dalam menangani suatu perkara perdata, hakim mempunyai wewenang antara lain :

1. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata(yang selanjutnya disingkat KUHPer))
2. Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) KUHPer
3. Mengeluarkan “Penetapan” agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama dan berikutnya.
4. Mengeluarkan perintah penangananan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan.

1.5.13 Penggugat

Pihak yang mengajukan gugatan atau tuntutan hak disebut penggugat atau badan hukum yang memerlukan akan perlindungan hukum dan oleh karenanya ia mengajukan gugatan. Syarat mutlak

untuk dapat mengajukan gugatan, adanya kepentingan langsung dari penggugat. Artinya tidak semua orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan, apabila gugatan itu tidak langsung dan melekat pada dirinya.

1.5.14 Tergugat

Pihak yang terkenan gugatan dari penggugat. Tergugat dapat membela diri dengan membantah kebenaran gugatan dengan menunjukan bukti-bukti administrasi dan bahan-bahan yang meyakinkan, disamping melakukan sumpah.

1.5.15 Pengertian Mediasi

Di dalam sistem penyelesaian sengketa terdapat tahapan penyelesaian melalui ruang Non Litigasi (di luar pengadilan) sebelum sengketa tersebut di proses di pengadilan.

Pengertian Mediasi itu sendiri yaitu cara penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu pihak ketiga yang dapat diterima , artinya pihak yang bersengketa mengizinkan pihak ketiga untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian. Meskipun demikian tidak berarti para pihak selalu berkehendak untuk melakukan atau menerima sepenuhnya apa yang dikemukakan oleh pihak ketiga. Menurut Pasal 1 (6) Perma Nomer 2 tahun 2003, yaitu suatu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dibantu oleh mediator.¹³ Mediator

¹³ Pasal 1 (6) Perma Nomor 2 Tahun 2003

itu sendiri terdiri dari Hakim majelis pemeriksa perkara, hakim bukan pemeriksa pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dan yang terakhir Advokat/Akademisi hukum atau profesi bukan hukum yang memiliki sertifikat mediator.

Mediator mempunyai tugas antara lain: mempersiapkan jadwal pertemuan, mendorong para pihak berperan langsung dalam proses mediasi, membantu para pihak merumuskan kesepakatan perdamaian.

Karakteristik mediasi yaitu intervensi mediator dapat diterima kedua belah pihak kemudian mediator tidak berwenang membuat keputusan, melainkan hanya mendengarkan, membujuk dan memberikan inspiratif kepada para pihak. Sedangkan sifat mediasi yaitu hakim mewajibkan para pihak menempuh lebih dulu proses mediasi, hakim wajib menunda sidang dan memberikan kesempatan para pihak untuk mediasi, hakim wajib memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi dan biayanya, proses mediasi pada dasarnya tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain, sedangkan mediasi untuk kepentingan public terbuka untuk umum.

1.5.16 Pengertian Putusan

Putusan hakim dalam pelaksanaannya terdapat beberapa putusan, diantaranya , yaitu : ¹⁴

1. Putusan Condemnatoir

Putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi

2. Putusan Insidentil

Putusan yang bersifat sementara untuk mencegah timbulnya akibat hukum yang lebih lanjut sebelum putusan dijatuhkan

3. Putusan Interlocutoir

Putusan yang isinya memerintahkan pembuktian

4. Putusan Lepas

Putusan yang dijatuhkan pada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu merupakan suatu tindakan pidana

5. Putusan Pengadilan

Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP

¹⁴ Affandi Aten, Affandi Wahyu, Tentang Melaksanakan Putusan Hakim Perdata, Alumni, Bandung, 1983. Hal 27

6. Putusan Praeparatoir

Putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir

7. Putusan Provisionil

Putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan

8. Putusan Sela

Putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara

9. Putusan Verstek

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tanpa hadirnya penggugat meskipun telah dipanggil secara layak (sebagaimana mestinya).

1.6 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni penyusun mencoba menganalisa permasalahan yang tentang Kekuasaan Kehakiman yang dikaitkan dengan Kewenangan Hakim sesuai dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,

keadaan atau gejala lainnya. Metode deskriptif ini di maksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang di teliti. Dalam hal ini untuk mendeskripsikan tentang Kekuasaan Kehakiman yang dikaitkan dengan Kewenangan Hakim.

1.6.1 Sumber Data

Guna memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulisan skripsi ini, maka bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu : ¹⁵

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kewenangan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan teori maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b. Undang Undang No 04 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- c. Kode Etik Hakim
- d. Kode Kehormatan Hakim

¹⁵ Mandarlis, Metode Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta 1995, Hal 53

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku literatur, karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dikaji, serta pengumpulan data melalui wawancara. Berdasarkan teori maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah :

- a. CST. Kansil, Kitab Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Bina Aksara, Jakarta, 1986
- b. R. Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara, Proses Persidangan, cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- c. Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnjaparamita, Jakarta, 1967
- d. Affandi Aten, Affandi Wahyu, Tentang Melaksanakan Putusan Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1983.

3. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum tersier adalah merupakan bahan hukum sebagai perangkat dari kedua bahan hukum sebelumnya terdiri dari :

- a. Kamus Hukum.
- b. Kamus bahasa Indonesia Balai Pustaka.

1.6.2 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Dalam pengumpulan bahan hukum, langkah pertama yang dikerjakan dalam penulisan skripsi ini adalah mencari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan serta putusan hakim yang kemudian dijadikan sebagai bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari membaca dan mempelajari literatur yang berupa buku dan karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori, dan pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang selanjutnya dibahas dan selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian.

1.6.3 Metode Analisis Data

Pengolahan data menggunakan metode diskriptif analisis artinya data yang diperoleh berdasarkan kenyataan yang ada Pengadilan Negeri Surabaya tentang praktek peradilan, kemudian dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dibahas, dianalisa, kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah. Lokasi yang dipilih sebagai penelitian adalah Pengadilan Negeri Surabaya.

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini nantinya akan disusun dalam empat bab. Tiap-tiap bab dibagi beberapa sub bab yang saling mendukung. Bab-bab yang tersusun tersebut nantinya merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain.

Bab I, Pendahuluan. Didalamnya terdiri dari tujuh sub bab yaitu sub bab pertama menguraikan tentang latar belakang masalah, kemudian sub bab kedua menguraikan tentang perumusan masalah. Selanjutnya di sub bab ketiga disajikan tujuan dan sub bab keempat mengenai manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Pada bagian sub bab kelima mengenai kajian pustaka yang merupakan landasan teori dari penulisan skripsi. Kemudian diuraikan beberapa konsep definisi yang berkaitan dengan judul penelitian. Selanjutnya sub bab keenam diuraikan tentang metode penelitian yang merupakan salah satu syarat dalam setiap penelitian. Intinya mengemukakan tentang tipe penelitian, sumber bahan hukum, dan sub bab yang ketujuh merupakan sub bab terakhir ini diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II, menguraikan tentang kesesuaian putusan hakim dikaitkan dengan azas-azas proses hukum yang cepat dan murah sesuai dengan Undang-undang pokok kehakiman yang berdasarkan Demi Ketuhanan yang Maha Esa, secara umum bab ini terdapat tiga sub bab yakni yang pertama mengenai proses hukum yang cepat dan murah, kemudian sub bab kedua mengenai azas-azas hakim dalam melaksanakan

persidangan, dan sub bab yang terakhir yakni sub bab ketiga mengenai kewajiban dan larangan profesi hakim.

Bab III, menguraikan tentang putusan hakim dalam memutus perkara perdata baik penggugat maupun tergugat sesuai dengan Undang-undang No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam bab ini terdapat tiga sub bab yang terdiri dari subbab pertama mengenai kode etik hakim dalam persidangan kemudian pada subbab kedua mengenai kewenangan hakim dalam memutus perkara perdata dan subbab terakhir mengenai sistem pengawasan hakim di Indonesia.

Bab IV, berdasarkan uraian-uraian dalam bab II dan bab III diatas tentang jawaban dari rumusan masalah yang dijadikan obyek penulisan. Selanjutnya di Bab IV merupakan Bab penutup yang terdiri dari dua sub bab, yaitu sub bab pertama mengenai kesimpulan dan sub bab kedua membahas tentang saran.